

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peran yang sangat penting dan strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan public. Desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna memperkuat otonomi suatu desa menuju kemandirian desa. Tujuan utama penyelenggaraan otonomi desa adalah untuk meningkatkan pelayanan public dan meningkatkan perekonomian desa. Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yaitu dana desa untuk menunjang segala sector di masyarakat

Berdasarkan tulisan diatas bahwa dalam wilayah desa terdapat adanya suatu masyarakat yang di atur oleh hukum positif dan karena desa merupakan desa otonom maka desa memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahanya sendiri yang dipimpin oleh seorang kepala desa.

Otonomi desa sendiri yaitu kewenangan yang diberikan kepada desa secara luas untuk dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahanya. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 7 menjelaskan “pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan disini bisa berarti dalam bentuk

pembangunan fisik (infrastruktur) dan juga pembangunan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).¹

Sejalan dengan pelaksanaan Desa otonom tersebut, implikasinya lebih lanjut Pemerintah Pusat berkewajiban memberikan kepercayaan kepada pemerintah desa sebagai desa otonom untuk mengelola anggaran suatu kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dengan harapan agar terciptanya kemandirian masyarakat dengan tetap melestarikan nilai-nilai kegotong-royongan yang ada di masyarakat.

Dengan demikian, pemberian dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan arah dan kebijakan pembangunan Desa itu sendiri.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.²

Dana desa adalah dana yang di dapatkan atau dana yang di alirkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Negara yang di peruntukan untuk desa guna untuk membangun desa, mensejahterakan masyarakat, dan serta untuk memberdayakan

¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 7

² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 pasal 1 ayat 2 tentang dana desa yang bersumber dari APBN

masyarakat. Keberadaan dana desa ini bisa membantu pembangunan untuk desa agar suatu desa tersebut bisa mensejahterakan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang nantinya bisa menunjang perekonomian suatu desa. Selain untuk pembangunan infrastruktur, dana desa tersebut bisa dipergunakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau (SDM) melalui program program pelatihan yang mana nantinya masyarakat bisa merasakan langsung hasil dari program pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut.

Pengelolaan dana desa sendiri sangatlah penting untuk dilakukan secara baik dan benar supaya pelaksanaan pengelolaan dana desa tersebut bisa serta merta dibagikan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu pengelolaan dana desa tersebut dilakukan supaya bisa untuk mengembangkan potensi desa yang meliputi sumber alami dan sumber sumber manusiawi baik yang sudah terwujud, maupun yang belum terwujud dan yang dapat diharapkan pemanfaatannya bagi kelangsungan dan perkembangan suatu desa dan masyarakat desanya. Jadi, potensi potensi tersebut yang seharusnya di kembangkan melalui pengelolaan dana desa tersebut supaya bisa memenuhi kebutuhan warga masyarakat desanya dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk mencapai kesejahteraan dalam arti yang luas.

Secara umum permasalahan dari pelaksanaan pengelolaan dana desa di berbagai desa berada pada belum maksimalnya perangkat desa dalam melaksanakan pertanggungjawaban, kurangnya rasa ikut melakukan gotong royong dalam pembangunan. Dari permasalahan secara umum tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa permasalahan berasal dari factor sumber daya manusia aparat desa dalam pembuatan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan dan kurang adanya

koordinasi yang baik dengan instansi terkait sehingga menghambat proses pelaksanaan pengelolaan dana desa.

Seperti contoh di Desa Singgopuran Kecamatan Kertasura Kabupaten Sukoharjo yang memiliki permasalahan dalam pengelolaan dana desa Tahun 2015. Diantaranya belum maksimalnya perangkat desa dalam pertanggungjawaban, kurangnya rasa ikut melakukan gotong royong dalam pembangunan jalan. Kurang maksimalnya pengelolaan dana desa yang dipengaruhi beberapa factor kendala yaitu minimnya kualitas sumber daya manusia aparat desa dalam beberapa hal yaitu terbatasnya pembuatan laporan pertanggungjawaban atas kegiatan yang sudah dilakukan diwilahnya. Selain itu adanya koordinasi yang kurang baik terhadap instansi terkait sehingga menghambat proses pelaksanaan program dalam pengelolaan dana desa. Dalam kegiatan belanja public dan pemberdayaan masyarakat belum berjalan maksimal karena desa lebih mengalokasikan dana desa pada pembangunan fisik seperti infrastruktur sedangkan pembangunan non fisik tidak terlalu banyak dianggarkan.

Akan tetapi permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa sedayulawas sangatlah berbeda dari desa yang lain. Pembangunan melalui dana desa di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan yang belum sesuai harapan, hal tersebut karena kepala desa masih kurang transparan dalam pengelolaan dana desa tersebut. Terbukti bahwa masih belum adanya papan pengumuman besaran dana yang di keluarkan setelah melaksanakan pembangunan yang berasal dari usulan masyarakat. Selain itu dalam melaksanakan pembangunan

masih mengandalkan borongan atau proyek dari luar meskipun masih ada masyarakat yang ikut dalam melaksanakan pembangunan.

Didalam proses pelaksanaan pembangunan juga pemerintah Desa masih meminjam kepada pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan pembangunan mulai dari pembelian bahan bahan material untuk pembangunan dan untuk memberi upah kepada tukang. Akan tetapi faktor itu tidak menjadi penghambat pemerintah Desa untuk tetap melaksanakan kegiatan pembangunan yang berasal dari usulan masyarakat, dikarenakan sebelumnya sudah ada perjanjian antara pemerintah Desa dengan pihak ketiga untuk meminjam dana dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Nantinya setelah Dana Desa yang diberikan oleh pusat cair maka akan langsung dibayarkan oleh pemerintah Desa ke pihak ketiga untuk membayar hutangh tersebut.

Selain itu, yang melatar belakangi saya mengambil penelitian di Desa Sedayulawas ini adalah karena beredarnya kasus dugaan korupsi Dana Desa oleh kepala Desa Sedayulawas. Seperti yang ditulis dalam tribunjatim.com, 13 April 2017.

“ Maolan kepala Desa Sedayulawas berurusan dengan hukum. Ini setelah warga yang tergabung dalam Gerakan masyarakat Pemantau Pembangunan Desa (Gema P2D) melaporkan kepala Desa Sedayulawas ke polres Lmongan atas dugaan korupsi bantuan keuangan dana desa 2017, Kamis (13/4/2017).³

Ini menjadi salah bukti tentang permasalahan yang disebabkan karena tidak adanya transparansi atau keterbukaan dari pemerintah desa kepada masyarakat terhadap pengelolaan dana desa yang diberikan dari pemerintah pusat melalui anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN). Maka dari itu, pemerintah desa

³ Tribunjatim.com. 13/4/2017

dalam melakukan pembangunan desa yang bersumber dari dana desa harus melibatkan masyarakat secara utuh supaya tidak ada kecurigaan dari masyarakat kepada pemerintah Desa dalam pembangunan yang bersumber dari dana desa.

Melihat latar belakang diatas yang timbul dugaan bahwa adanya korupsi dana desa yang dilakukan oleh kepala Desa Sedayulawas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai pelaksanaan pengelolaan dana desa tahun 2017 di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Selain itu untuk mengetahui bagaimana palaksanaan pengelolaan Dana Desa Tahun 2017 di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dan hambatan pelaksanaan pengelolaan Dana Desa Tahun 2017 di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penting bagi peneliti untuk mengkaji lebih lanjut dan mendalam terkait dengan sejauh mana pengelolaan dana Desa tahun 2017 di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan serta apa saja factor yang menjadi penghambat dari pengelolaan dana Desa tahun 2017 di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan sehingga dalam rumusan masalah ini peneliti akan menjawab pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan dana Desa tahun 2017 di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan?
2. Faktor penghambat dan pendukung dalam melaksanakan pengelolaan dana Desa tahun 2017 di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari dilakukanya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan sejauh mana pelaksanaan pengelolaan dana Desa tahun 2017 di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam melaksanakan pengelolaan dana Desa tahun 2017 di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bersifat teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan terkait tentang pelaksanaan pengelolaan dana Desa tahun 2017 di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi pemerintah pusat, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk tetap mempertahankan adanya bantuan aliran Dana Desa ke pemerintah Desa, supaya pemerintah Desa dapat mengembangkan dan membangun sendiri Desanya tanpa ada campur tangan dari pihak luar.
- b. Bagi pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rekomendasi bahwa dalam pelaksanaan

pengelolaan Dana Desa ini perlu adanya pengawasan dan pendampingan dari pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah supaya dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa tidak akan terjadi kecurangan ataupun korupsi dari pemerintah Desa sehingga pengembangan dan pembangunan yang ada di Desa melalui anggaran dana Desa (ADD) tersebut bisa merata ke seluruh masyarakat Desa.

- c. Bagi institusi, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi serta referensi khususnya mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang dalam melakukan penelitian terkait dengan pengelolaan Dana Desa.
- d. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberi ilmu dan membuka pandangan masyarakat Desa bahwa dengan adanya pengelolaan dana Desa bisa membantu pengembangan dan pembangunan desa yang nantinya bisa dirasakan oleh masyarakat secara langsung.

E. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional

1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah pengembangan secara umum tentang konsep yang digurukan oleh peneliti dalam penelitian. Beberapa konsep yang berkaitan dengan penelitian peneliti adalah sebagai berikut:

a. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua perencanaan yang sebelumnya sudah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan. Pelaksanaan tersebut perlu

dilakukan supaya perencanaan yang sebelumnya sudah dibuat bisa berjalan sesuai dengan yang di inginkan atau sesuai harapan.

”Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.”⁴

Dari pengertian yang ditulis diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu dilapangan maupun diluar lapangan. Yang mana kegiatannya melibatkan beberapa unsur yang disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh dana yang cukup dan alat alat penunjang.

b. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilaksanakan untuk mengelola suatu Keuangan Desa yang meliputi berbagai tahapan, diantaranya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban.

“Permendagri No. 113 Tahun 2014 menjelaskan tentang pengelolaan Keuangan Desa yang memuat kebijakan yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan laporan pertanggungjawaban Dana Desa.”⁵

c. Dana Desa

Keberadaan dana desa ini bisa membantu pembangunan untuk Desa agar suatu Desa tersebut bisa mensejahterakan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang nantinya bisa menunjang perekonomian suatu Desa. Selain untuk

⁴ Nurdin Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, ha. 70

⁵ Basuki, S.H., *pengelolaan keuangan Daerah*, (Yogyakarta: Kreasi wacana, 2007).11

pembangunan infrastruktur, dana desa tersebut bisa dipergunakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM.

“Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran dan pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.”⁶

d. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurut UU No 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 3 tentang Desa, pemerintahan Desa diartikan sebagai:

“Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa”.⁷

Berdasarkan uraian diatas, pemerintah desa yaitu suatu kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang sebelumnya sudah direncanakan kemudian dilaksanakan oleh pemerintah desa beserta jajarannya untuk mencapai suatu tujuan yang berdampak pada masyarakat desa itu sendiri.

2. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah pendefinisian dari masing-masing konsep yang digunakan dalam penelitian secara operasional dan nyata. Adapun konsep yang akan didefinisikan secara operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 pasal 1 Ayat 2 tentang dana desanyang bersumber dari APBN

⁷ UU No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3 Tentang Desa.

**a. Pelaksanaan pengelolaan dana desa tahun 2017 di Desa Sedayulawas
Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan**

1. Perencanaan Pengelolaan Dana Desa
2. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa
3. Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa
4. Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa

**b. Faktor penghambat dan pendukung dalam melaksanakan pengelolaan dana
desa tahun 2017 di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten
Lamongan**

1. Faktor Penghambat
2. Faktor Pendukung

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif oleh karena permasalahan yang di teliti merupakan suatu fenomena sosial yang sifatnya deskriptif. Menurut Djam'an Datori dan Aan Komariah, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan cara mendiskripsikan dengan benar berdasarkan kata-kata dan teknik pengumpulan data analisis yang relevan serta diperoleh dari situasi yang alamiah.⁸

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Bodgan dan Taylor⁹ mendefinisikan penelitian sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari

⁸ Satori Djam'an dan Komariah, Aan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 2013, Bandung: Alfabeta

⁹ Bagong, Suyanto. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Prenada Media Group

hasil pengamatan. Maka dari itu penulis memilih jenis penelitian deskriptif sebab hasil penelitian akan di dasarkan pada data dan hasil pengamatan berupa informasi yang mendalam terkait pelaksanaan pengelolaan dana Desa Tahun 2017 di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

2. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data yang diperlukan oleh peneliti. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari pihak pertama atau data yang diperoleh secara langsung dari hasil observasi dan hasil wawancara peneliti dengan informan penelitian. Informan penelitian yang dimaksud penulis adalah Kepala Desa Sedayulawas, kepala BPD Desa Sedayulawas, dan kepala LPM Desa Sedayulawas. Pemilihan informan dalam penelitian ini didasarkan pada penguasaanya terhadap masalah penelitian dan keterlibatannya secara langsung dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak kedua atau data yang diperoleh secara tidak langsung dimana sifat dari data sekunder ini adalah melengkapi data primer seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Desa, buku, jurnal, Koran dan situs internet yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, data menjadi sesuatu yang sangat urgen untuk menjawab rumusan permasalahan dalam penelitian. Data diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan data yang nantinya akan diolah dan dianalisis dengan metode tertentu. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mengamati dan mencatat segala informasi yang diperoleh dilapangan sebagaimana realitanya dengan tujuan memperoleh pemahaman atau pembuktian terhadap informasi yang diamati dan di catat sebelumnya.¹⁰

b. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan atau tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber yang diarahkan untuk memperoleh jawaban atas rumusan permasalahan dalam penelitian sekaligus juga melakukan eksplorasi terhadap fenomena dan kebijakan yang diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang diperoleh dari sekumpulan dokumen atau catatan yang tersimpan sebagai sumber data yang akan digunakan untuk mengkaji dan menafsirkan suatu fenomena sosial terkait permasalahan dalam penelitian.

¹⁰ Rahayu, I dan Ardani. 2004. T, *Obesrvasi dan Wawancara*, hlm 1

4. Informan Penelitian

Pemilihan informan dalam penelitian sangat diperhatikan oleh peneliti. Sebab informan penelitian adalah orang yang akan dijadikan sebagai narasumber pada wawancara peneliti guna membantu dalam hal mendapatkan data dan memberikan informasi yang mendalam, lengkap dan jelas terkait permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti dalam penelitian skripsi. Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala Desa Sedayulawas
- b. Ketua BPD Desa Sedayulawas
- c. Ketua LPM Desa Sedayulawas

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan lokasi peneliti untuk menemukan data-data yang terkait dengan tema yang telah ditentukan, maka peneliti memilih tempat di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

6. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan mengorganisasikan data, memilah-milah data menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskan, mencari dan menemukan apa yang penting untuk dipelajari serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Adapun proses yang dilakukan dalam menganalisis data adalah melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilah hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal yang penting. Reduksi data biasanya dilakukan dengan jalan

abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian.

b. Display Data atau Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman, penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan, dimana pada langkah ini akan dilakukan penyederhanaan data yang diperoleh dari penelitian tanpa mengurangi hal-hal pokok dan penting.

c. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap ini adalah tahap penarikan kesimpulan dari data yang telah diperoleh lapangan dan telah dipaparkan sebelumnya. Penarikan kesimpulan ini juga merupakan usaha untuk mencari makna, arti dan inti dari keseluruhan penjelasan yang telah dipaparkan sebagai tahapan akhir dalam proses memecahkan permasalahan pada penelitian.